

TANTANGAN DAN UPAYA PENINGKATAN KINERJA APARATUR DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK: STUDI KUALITATIF DI DESA SALUT

M. Adib Zata Ilmam
Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
inizata@gmail.com

Lalu Moh. Nazar Fajri
Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
nazarfajri8@gmail.com

Nurul Jannah
Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
nuruljnh47@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan objek wisata Telaga Biru di Desa Perian sebagai bentuk pariwisata berbasis komunitas yang tumbuh dari inisiatif lokal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, studi ini menemukan bahwa pengelolaan Telaga Biru dilakukan secara swadaya oleh pemuda desa tanpa dukungan kelembagaan formal pada tahap awal. Kegiatan wisata telah menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial berbasis gotong royong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata berjalan secara substantif, bukan sekadar simbolik, dan memperlihatkan adanya model ko-kelola konservasi antara komunitas dan pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Namun demikian, pengembangan wisata ini juga menghadapi tantangan serius, seperti ketiadaan struktur kelembagaan legal, rendahnya kapasitas manajerial, dan keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pembiayaan. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor dibutuhkan agar potensi ekonomi, sosial, dan ekologis yang dimiliki Telaga Biru dapat dikelola secara berkelanjutan.

Keywords: *Pariwisata berbasis komunitas, Telaga Biru, pemberdayaan masyarakat, konservasi, pengelolaan kolaboratif, ekonomi lokal, TNGR.*



A. Pendahuluan

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Peranannya bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan sektor-sektor lain seperti transportasi, perdagangan, kuliner, kerajinan, dan jasa lainnya. Secara lebih spesifik, pariwisata memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, serta pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Oleh karena itu, arah pembangunan pariwisata nasional dewasa ini tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan konservasi sumber daya alam¹.

Dalam konteks global, pariwisata yang berkelanjutan semakin mendapat perhatian. Salah satu bentuknya adalah ekowisata, yang diartikan sebagai bentuk kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, serta menciptakan pengalaman wisata yang mendidik dan bermakna bagi pengunjung. Ekowisata berupaya memadukan kepentingan konservasi dengan pembangunan ekonomi secara harmonis, sehingga dapat menjadi sarana efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada tujuan ke-8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan ke-15 (melestarikan ekosistem daratan)².

Di Indonesia, potensi ekowisata sangat besar, mengingat kekayaan alam dan keragaman budaya yang dimiliki oleh tiap daerah. Salah satu pendekatan yang kian dikembangkan dalam pengelolaan

¹ United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

² Kiwang, A. S. & Arif, F. M. (2020). Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Labuan Bajo Akibat Pembangunan Pariwisata. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*. <https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/gulawentah/article/view/7290>



ekowisata adalah pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism), yakni bentuk pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam seluruh aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi kegiatan wisata. Model ini diyakini lebih mampu menciptakan pemerataan manfaat ekonomi, meningkatkan kapasitas sosial, serta memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya lokal mereka.

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat membawa dampak positif bagi kesejahteraan lokal. Kiwang dan Arif (2020) dalam penelitiannya di Labuan Bajo menunjukkan bahwa keberadaan pariwisata telah menciptakan alternatif pekerjaan baru, memperkuat jaringan sosial masyarakat, dan meningkatkan pendapatan keluarga melalui sektor informal seperti jasa parkir, makanan ringan, dan homestay³. Leha et al. (2020) menambahkan bahwa keberhasilan pengelolaan wisata tidak terlepas dari kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan limbah, sebagai salah satu indikator keberlanjutan destinasi⁴. Sementara itu, studi oleh Ismowati et al. (2024) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis wisata nasional sangat menentukan seberapa besar dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lokal, terutama dalam konteks penguatan UMKM dan koperasi desa⁵.

Namun demikian, tidak sedikit pula studi yang menggarisbawahi risiko yang dapat muncul apabila pengelolaan pariwisata tidak memperhatikan prinsip keadilan sosial dan

³ Leha, S. et al. (2020). Pengelolaan Sampah untuk Mendukung Keberlanjutan Pariwisata di Labuan Bajo. *Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup*. https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/Kesehatan_Masyarakat/article/view/995

⁴ Ismowati, R. et al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam KSPN Labuan Bajo. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik*. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/2369>

⁵ Wiratmi, D. (2018). *Ekonomi Politik Ekowisata Labuan Bajo*. Tesis S2, UGM. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/163725>



perlindungan terhadap masyarakat adat atau lokal. Dwi Wiratmi (2018), dalam kajian ekonomi politik ekowisata di Labuan Bajo, menyoroti adanya ketimpangan kontrol atas sumber daya antara investor luar dan masyarakat lokal, yang berdampak pada terpinggirkannya pelaku usaha mikro dan hilangnya akses masyarakat terhadap lahan produktif yang beralih fungsi menjadi fasilitas pariwisata⁶. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak cukup hanya sebatas partisipasi simbolik, melainkan harus terwujud dalam bentuk keterlibatan nyata yang dijamin oleh regulasi dan kelembagaan yang kuat.

Dalam konteks lokal, Desa Perian di Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, merupakan salah satu wilayah dengan potensi ekowisata yang belum sepenuhnya tergarap. Terletak di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Rinjani, desa ini memiliki bentang alam hutan yang masih alami serta sumber air jernih yang membentuk sebuah telaga berwarna kebiruan, yang dikenal dengan nama Telaga Biru. Sejak mulai dikembangkan sebagai objek wisata pada tahun 2020 oleh kelompok pemuda desa setempat, Telaga Biru menarik perhatian pengunjung karena keindahan alamnya yang masih asri dan relatif tersembunyi. Aktivitas wisata yang ditawarkan meliputi trekking ringan, camping, wisata air, hingga fotografi alam.

Pengelolaan destinasi ini dilakukan secara kolektif oleh kelompok Pemuda Telaga Biru, dengan dukungan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Bentuk kolaborasi ini menjadi contoh penerapan model co-management dalam pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menjaga kelestarian kawasan, mengatur distribusi pengunjung, dan menciptakan produk wisata berbasis kearifan lokal. Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, kegiatan ekonomi masyarakat

seperti penyewaan tenda, warung makan, jasa transportasi lokal, dan souvenir mulai berkembang.

Menurut data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, kunjungan wisatawan mengalami peningkatan sebesar 15% dalam tiga tahun terakhir, dengan total wisatawan domestik mencapai 638.361 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 45.222 orang⁷. Tren ini menunjukkan adanya potensi besar bagi pengembangan wisata lokal jika dikelola secara sistematis dan partisipatif. Akan tetapi, sejauh mana pengembangan pariwisata ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Perian masih perlu dikaji secara empiris.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan pariwisata Telaga Biru dan mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian mengenai ekowisata berbasis komunitas, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pengelolaan destinasi serupa di wilayah lain.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pengembangan pariwisata di Telaga Biru serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara kontekstual dan mendalam berdasarkan pandangan para pelaku atau subjek yang terlibat secara langsung. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mencari generalisasi, melainkan berupaya

⁷ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. (2023). Laporan Tahunan Kunjungan Wisata.



memahami makna yang tersembunyi di balik tindakan, kebijakan, dan interaksi sosial yang terjadi di lapangan⁸.

Secara geografis dan administratif, Desa Perian merupakan salah satu desa yang terletak di sekitar kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Wilayah ini dipilih secara purposive (bertujuan) karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian, yakni keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata berbasis alam yang berkembang secara swadaya. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa pengembangan Telaga Biru masih relatif baru, sehingga prosesnya masih berlangsung dan dapat diamati secara langsung, baik dari sisi kelembagaan, partisipasi, maupun dinamika ekonominya.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

1. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas wisata, interaksi sosial antara pengunjung dan masyarakat, bentuk pelayanan wisata, dan kondisi fisik lingkungan Telaga Biru. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran riil dan tak terucapkan yang tidak selalu muncul dalam wawancara.
2. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat memperoleh informasi yang luas namun tetap terfokus. Pertanyaan dikembangkan secara fleksibel mengikuti alur percakapan, dengan tetap berpegang pada topik utama yaitu proses pengelolaan, tantangan, dan persepsi masyarakat terhadap manfaat ekonomi dari pariwisata.
3. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen dan catatan yang relevan, seperti data kunjungan wisatawan, laporan kegiatan kelompok pemuda pengelola, berita dari media lokal,

⁸ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.



serta kebijakan atau program dari pihak TNGR maupun pemerintah desa.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria:

- a) memiliki peran langsung dalam pengembangan Telaga Biru,
- b) mewakili kelompok masyarakat penerima dampak ekonomi, dan
- c) memahami kebijakan atau aspek kelembagaan pengelolaan wisata di kawasan hutan.

Sebanyak empat orang informan utama diwawancarai secara mendalam, yang terdiri atas: dua orang dari kelompok Pemuda Telaga Biru, satu orang warga lokal yang membuka usaha di sekitar objek wisata, dan satu orang staf dari Resort Joben, SPTN Wilayah II TNGR. Jumlah informan ini dianggap cukup karena data yang diperoleh telah menunjukkan pola informasi yang berulang (saturation) dan saling menguatkan satu sama lain.

Analisis data dilakukan secara simultan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama:

1. Reduksi data – proses memilah, menyederhanakan, dan merangkum informasi mentah menjadi kategori-kategori utama seperti bentuk pengelolaan, partisipasi masyarakat, dampak ekonomi, dan tantangan.
2. Penyajian data – data disusun dalam bentuk naratif deskriptif untuk mempermudah penarikan pola, hubungan antar kategori, dan penggambaran konteks secara utuh.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi – simpulan awal diuji melalui perbandingan data antar informan, pengamatan langsung, dan hasil dokumentasi, guna memastikan konsistensi dan validitas interpretasi⁹.

⁹ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.



Untuk menjaga keabsahan data (data trustworthiness), digunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber (informan, observasi, dan dokumen), serta metode yang berbeda (wawancara dan observasi). Selain itu, dilakukan pencatatan rinci dalam bentuk catatan lapangan (field notes), dokumentasi foto, dan pengkodean tematik selama proses analisis.

Waktu penelitian dilakukan dalam rentang bulan Mei–Juli 2025, dengan beberapa kali kunjungan lapangan untuk observasi dan wawancara. Proses ini memungkinkan peneliti tidak hanya mengumpulkan data statis, tetapi juga memahami perubahan-perubahan yang terjadi seiring waktu, seperti peningkatan aktivitas ekonomi, perubahan sikap masyarakat, dan respons terhadap kebijakan dari pihak pengelola kawasan.

Dengan pendekatan dan teknik ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai praktik pengembangan pariwisata berbasis komunitas serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

C. Hasil dan Diskusi

1. Inisiatif Komunitas: Penggerak Awal Pengembangan Telaga Biru

Pengembangan objek wisata Telaga Biru di Desa Perian berakar dari kesadaran ekologis dan semangat pemberdayaan sosial sekelompok pemuda lokal. Mereka menyadari bahwa keberadaan danau kecil alami di wilayah hutan sekitar desa merupakan potensi wisata yang belum tersentuh, padahal lokasinya hanya berjarak sekitar 20 menit dari permukiman warga. Pada tahun 2020, di tengah situasi pandemi yang mempersempit peluang kerja dan mobilitas ekonomi, para pemuda ini mulai membersihkan area sekitar telaga, membuka jalan setapak dari pemukiman, dan mempromosikan tempat tersebut melalui media sosial.



Model pengembangan yang mereka terapkan sepenuhnya bersifat swadaya dan partisipatif, tanpa dukungan dana awal dari pemerintah atau lembaga luar. Akses jalan, spot foto, hingga fasilitas sederhana untuk berkemah dibuat dari bahan-bahan lokal yang mudah didapat. Bahkan promosi awal dilakukan secara sukarela melalui akun media sosial pribadi. Tindakan ini menunjukkan bentuk modal sosial yang kuat dalam masyarakat Desa Perian, di mana relasi informal seperti kepercayaan, solidaritas, dan rasa memiliki menjadi pengganti dari instrumen kelembagaan formal yang belum terbentuk. Hal ini sesuai dengan teori social capital yang dikemukakan oleh Bourdieu dan Putnam, di mana kepercayaan dan jaringan sosial menjadi fondasi dari tindakan kolektif yang produktif¹⁰.

Pemuda desa menjadi aktor utama yang mendobrak keterbatasan struktural. Mereka tidak hanya menjadi pekerja teknis di lapangan, tetapi juga berfungsi sebagai perencana, operator, sekaligus komunikator yang menjembatani masyarakat, pengunjung, dan pemangku kebijakan dari pihak TNGR. Dalam banyak kasus, peran generasi muda dalam pembangunan desa seringkali dipandang sebelah mata. Namun dalam konteks ini, mereka justru menjadi pengungkit yang mengubah relasi antara sumber daya lokal dan peluang ekonomi wisata.

2. Pengelola Konservasi: Hubungan Komunitas dan TNGR

Salah satu kekhasan dari pengelolaan Telaga Biru adalah keberadaannya di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Ini berarti bahwa segala bentuk aktivitas manusia di kawasan tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip konservasi. Dalam banyak kasus, hal ini menjadi hambatan bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan ekonomi karena adanya batasan hukum dan administratif. Namun dalam kasus Telaga Biru, yang

¹⁰ Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.



terjadi justru bentuk kerja sama antara komunitas lokal dan lembaga konservasi negara, atau yang dalam literatur dikenal dengan istilah co-management atau pengelolaan bersama sumber daya alam¹¹.

Pihak Resort Joben, sebagai perpanjangan tangan Balai TNGR di tingkat tapak, secara terbuka merespons inisiatif masyarakat dengan pendekatan pendampingan. Izin aktivitas wisata diberikan secara informal, dengan catatan bahwa masyarakat tidak boleh melakukan pembangunan permanen dan harus menjaga kelestarian vegetasi sekitar telaga. Dalam beberapa pertemuan, pihak TNGR memberikan edukasi lingkungan, mendampingi kegiatan bersih-bersih kawasan, serta memberikan saran teknis dalam pengelolaan sampah dan pengaturan alur kunjungan.

Hubungan ini tidak lepas dari dinamika di satu sisi masyarakat ingin mengembangkan lebih lanjut, misalnya dengan membangun toilet atau gazebo permanen, namun di sisi lain TNGR menekankan prinsip konservasi. Ketegangan ini menciptakan ruang dialog yang produktif, di mana kedua pihak saling belajar mengenai keterbatasan dan potensi masing-masing. Ini menjadi bentuk praksis dari teori commons governance yang menekankan pentingnya mekanisme kolaboratif dalam mengelola sumber daya bersama¹².

3. Transformasi Ekonomi: Dampak terhadap Mata Pencaharian Lokal

Sebelum pengembangan Telaga Biru, mayoritas masyarakat Desa Perian menggantungkan hidup dari pertanian subsisten dan kerja serabutan musiman. Mata pencaharian tersebut tidak stabil, bergantung pada musim dan harga pasar yang tidak pasti. Sejak

¹¹ Berkes, F. (2009). Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning. *Journal of Environmental Management*, 90(5).

¹² Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.



Telaga Biru dikenal publik, terjadi pergeseran dalam struktur penghidupan masyarakat, terutama pada dua lapis utama:

Pertama, terbentuknya sumber pendapatan baru, seperti penjualan makanan/minuman di warung sekitar, jasa parkir kendaraan, jasa penyewaan tenda dan tikar, serta penyediaan kebutuhan logistik kegiatan berkemah.

Kedua, terbukanya peluang kerja informal, terutama bagi remaja dan ibu rumah tangga, untuk berkontribusi dalam layanan wisata meski tanpa latar belakang kepariwisataan.

Dari hasil wawancara mendalam dengan pengelola dan warga lokal, ditemukan bahwa dalam musim liburan atau akhir pekan panjang, penghasilan dari usaha kecil ini bisa mencapai dua sampai tiga kali lipat dari penghasilan bertani biasa. Seorang warga mengatakan:

“Kalau ada rombongan camping, kami bisa jual jagung, kopi, madu hutan, bahkan kalau perlu bantu masak. Sebelum ada Telaga Biru, kami jarang bisa jual ke orang luar.”

Ini menegaskan konsep multiplier effect dari pariwisata, di mana kehadiran pengunjung memicu rantai aktivitas ekonomi lokal secara horizontal. Sejalan dengan penelitian Suansri (2003) dan Yuliasuti (2017), pengembangan wisata berbasis komunitas mampu menciptakan sirkulasi ekonomi lokal yang kuat jika dimanajementi secara partisipatif dan inklusif¹³.

Namun, belum adanya sistem pencatatan keuangan yang rapi, minimnya akses terhadap pelatihan kewirausahaan, serta absennya kelembagaan formal seperti koperasi atau BUMDes, membuat pertumbuhan ekonomi ini belum optimal. Risiko kecurangan,

¹³ Suansri, P. (2003). *Community-Based Tourism Handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour - REST; Yuliasuti, N. (2017). Dampak Ekonomi Pengembangan Pariwisata Alam. *Jurnal Kawistara*, 7(3).



konflik internal, dan stagnasi inovasi tetap terbuka jika tidak segera ditangani.

4. Ketimpangan Kapasitas dan Tantangan Kelembagaan

Meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam mobilisasi sosial dan ekonomi, pengelolaan Telaga Biru masih menghadapi tantangan serius dalam hal kapasitas kelembagaan. Kelompok pengelola belum memiliki struktur organisasi yang baku, belum berbadan hukum, dan belum memiliki perangkat administratif seperti buku kas, perjanjian kerja sama, atau SOP pelayanan wisata. Seluruh keputusan dilakukan secara musyawarah, dan tidak ada notulensi formal.

Dalam jangka pendek, model informal ini memberi fleksibilitas tinggi. Namun dalam jangka panjang, hal ini berisiko menimbulkan konflik internal, ketidakjelasan hak dan kewajiban, serta kesulitan dalam menjalin kemitraan dengan pihak luar. Dalam studi Scheyvens (1999), dijelaskan bahwa keberhasilan pariwisata komunitas bukan hanya ditentukan oleh potensi alam dan partisipasi, tetapi juga oleh kekuatan kelembagaan lokal¹⁴.

Sebagai contoh, ketika pihak TNGR atau pemerintah kabupaten ingin memberikan bantuan berbentuk alat atau pelatihan, sering terkendala karena tidak ada rekening resmi atau legalitas organisasi. Hal ini menjadi pembelajaran penting bahwa pembangunan kelembagaan adalah komponen krusial yang tidak boleh diabaikan dalam wisata berbasis komunitas.

D. Kesimpulan

¹⁴ Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245–249.



Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan objek wisata Telaga Biru di Desa Perian merupakan praktik nyata dari pariwisata berbasis komunitas yang tumbuh dari inisiatif lokal, diperkaya oleh partisipasi generasi muda, dan diperkuat oleh pola kerja sama dengan lembaga konservasi negara (TNGR). Inisiatif ini berhasil menggerakkan potensi sosial dan ekonomi masyarakat secara mandiri, meskipun dilakukan dalam kondisi sumber daya yang terbatas dan tanpa dukungan kelembagaan formal pada tahap awal.

Keberhasilan awal tersebut ditandai oleh beberapa aspek penting. Pertama, adanya mobilisasi modal sosial yang tinggi di antara warga desa, khususnya pemuda, yang menjadi motor penggerak perubahan. Kedua, munculnya sumber pendapatan alternatif melalui aktivitas wisata yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi lokal, terutama pada sektor informal seperti jasa parkir, warung, dan penyewaan alat berkemah. Ketiga, keberadaan TNGR sebagai pengelola kawasan konservasi telah direspons secara adaptif oleh masyarakat melalui mekanisme ko-kelola, membentuk sinergi antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkap sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani agar keberhasilan awal ini dapat berlanjut secara berkelanjutan. Tantangan tersebut antara lain: belum adanya struktur kelembagaan formal, keterbatasan kapasitas manajerial dan administrasi, serta ketergantungan pada pengunjung musiman tanpa strategi diversifikasi usaha yang matang. Jika tidak ditangani, kondisi ini berisiko menimbulkan stagnasi atau bahkan konflik dalam komunitas pengelola.

Untuk itu, diperlukan intervensi yang bersifat fasilitatif dari pemerintah desa, lembaga konservasi, maupun aktor non-pemerintah yang berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan kewirausahaan, dan perluasan jejaring kemitraan. Ke depan, model pengelolaan wisata seperti di Telaga Biru dapat dijadikan referensi strategis bagi desa-desa lain di



kawasan penyangga taman nasional untuk mengembangkan potensi pariwisata lokal secara inklusif dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan nilai-nilai ekologis dan sosial budaya yang telah ada.

Daftar Pustaka

- Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and disenchantment: The role of community in natural resource conservation. *World Development*, 27(4), 629–649. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00161-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2)
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Berkes, F. (2009). Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1692–1702. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.12.001>
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets. ACTA Publications.
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From clients to citizens: Asset-based community development as a strategy for community-driven development. *Development in Practice*, 13(5), 474–486. <https://doi.org/10.1080/0961452032000125857>
- Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press.
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245–249. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(98\)00069-7](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7)



Suansri, P. (2003). *Community-based tourism handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour (REST).

Yuliasuti, N. (2017). Dampak ekonomi pengembangan pariwisata alam di desa wisata berbasis komunitas. *Jurnal Kawistara*, 7(3), 227–240. <https://doi.org/10.22146/kawistara.26510>

